

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Eksistensi

Kata eksistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Alwi dkk., 2005) diartikan sebagai hal berada; keberadaan. Dalam penelitian ini, kata eksistensi merujuk pada keberadaan dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta. Selain itu, eksistensi atau keberadaan inilah yang akan menunjukkan apakah JAI ada dan diterima dalam masyarakat Yogyakarta.

Eksistensi ini, juga berkaitan dengan strategi atau cara bertahan para penganut JAI dalam menghadapi tekanan. Konsep pertahanan diri tersebut, adalah sesuatu hal yang penting untuk melihat bagaimana proses sosial yang terjalin antara anggota JAI dengan sesama anggotanya, atau antara para anggota JAI dengan masyarakat lain.

Strategi dan cara juga diamati untuk melihat bagaimana mereka mempererat jalinan anggotanya untuk mempertahankan eksistensi mereka. Penguatan JAI tersebut bisa dilihat melalui berbagai acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus JAI untuk para anggotanya. Pada acara dan kegiatan tersebutlah, momen bertemu, bersilaturahmi, serta

berdiskusi terjadi. Hal ini dilakukan, tidak lain untuk memupuk solidaritas diantara sesama anggota JAI.

2. Tinjauan Ahmadiyah

Ahmadiyah, merupakan salah satu gerakan Islam yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dia berasal dari keluarga bangsawan suku Barsal, dinasti Mughal, lahir pada 1835 dari sebuah keluarga elite di Qadian, Punjab, British India. Nenek moyang mereka adalah orang Persia yang hijrah ke daerah India pada tahun 1503 M. Pada masa kanak-kanaknya, kondisi India masih terbelenggu pada kebodohan. Namun demikian, Mirza Ghulam beruntung, karena ia mendapat pendidikan yang cukup baik. Ia belajar secara prifat kepada Fazal Ilahi tentang mengaji Al-Quran dan beberapa kitab berbahasa Persia (Novianti, 2006: 13-15).

Merujuk catatan Iain Adamson dalam bukunya yang berjudul *Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian* yang diterjemahkan oleh Suhadi Madyohartono (2010), dijelaskan bahwa Ahmadiyah saat ini merupakan salah satu gerakan Islam yang kokoh di dunia. Menurutnya, pengikut Ahmadiyah yang kini telah menjadi lebih dari 10 juta di dunia, merupakan perkembangan Islam yang paling cepat dalam waktu 100 tahun. Iain Adamson yang merupakan seorang novelis Kristiani, menyebutkan bahwa salah satu misi dari Ahmadiyah adalah mengokohkan gerakan Ahmadiyah ke seluruh penjuru dunia, sekaligus menerjemahkan Al-Quran kedalam 117

bahasa.

Adamson menambahkan lagi bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, akan tetapi bukan nabi pembawa syariat. Nabi Muhammad SAW lah, nabi pembawa syariat yang terakhir. Ada perbedaan definisi mengenai istilah nabi, antara umat Islam pada umumnya dan Ahmadiyah. Menurut kepercayaan Ahmadiyah, nabi adalah seseorang yang dapat memimpin manusia untuk mengenal Tuhan dan mengajarkan kepada mereka tentang tata cara beribadah kepada-Nya, namun demikian nabi terakhir yang membawa syariat tetaplah Nabi Muhammad SAW.

Menurut Ghulam Ahmad, Ahmadiyah merupakan bagian dari Islam. Anggota Ahmadiyah mengamalkan kelima rukun Islam yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ahmadiyah juga berkeinginan mendorong dialog antar iman (agama/ kepercayaan, *-pen*) dan berusaha memperbaiki kesalahpahaman mengenai Islam di dunia Barat. Mirza Ghulam Ahmad menulis lebih dari 80 buku serta mengedepankan pendekatan yang anti kekerasan (*non-violence*) (Tim Penyusun IAIN, 1995: 85) .

3. **Tinjauan Identitas**

a. Pengertian Identitas Sosial

Identitas sosial adalah ciri atau keadaan khusus dari suatu kelompok. Hal ini merupakan indikasi bahwa individu memang tak bisa lepas dari pengaruh lingkungan. Menurut Hogg dan Abrams

(dalam Nuraeini, 2005) menjelaskan identitas sosial sebagai rasa keterikatan, peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat.

b. Teori Identitas Sosial

Pada awalnya, teori identitas sosial berasal dari teori perbandingan sosial (*social comparison theory*) dari Festinger (1954) (dalam Hogg & Abrams, 2000), yang menyatakan bahwa individu akan berusaha melihat diri mereka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan kecil atau serupa. Teori identitas (*identity theory*) secara eksplisit lebih fokus terhadap struktur dan fungsi identitas individual, yang berhubungan dengan peran perilaku yang dimainkan di masyarakat. Teori identitas sosial sendiri menyatakan bahwa identitas diikat untuk menggolongkan keanggotaan kelompok, “teori identitas sosial dimaksudkan untuk melihat psikologi hubungan sosial antar kelompok, proses kelompok dan sosial diri” (Hogg et al, 2000). Menurut Jacobson (2003) teori identitas sosial fokus terhadap individu dalam mempersepsikan dan menggolongkan diri mereka berdasarkan identitas personal dan sosial mereka.

Henry Tajfel adalah salah satu tokoh teori identitas sosial. Tajfel

mendefinisikan identitas sosial sebagai pengetahuan individu dimana seseorang merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan emosi serta nilai (Tajfel, 1979 dalam Nuraeni 2005). Identitas sosial juga merupakan konsep diri seseorang sebagai anggota kelompok (Hogg & Abrams, 2000). Identitas bisa berbentuk kebangsaan, ras, etnik, kelas pekerja, agama, umur, gender, suku, keturunan, dan lain-lain. Biasanya, pendekatan dalam identitas sosial erat kaitannya dengan hubungan *inter relationship*, serta kehidupan alamiah masyarakat dan *society* (Hogg & Abrams, 2000).

Menurut teori identitas sosial, individu bukanlah individu mutlak dalam suatu kehidupan. Disadari atau tidak, individu merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini, konsep identitas sosial adalah bagaimana seseorang itu secara sosial dapat didefinisikan (Verkuyten, 2005).

Asumsi umum mengenai konsep identitas sosial menurut Tajfel, dalam buku karya Hogg & Abrams (2000) adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap individu selalu berusaha untuk merawat atau meninggikan *self-esteemnya*: mereka berusaha untuk membentuk konsep diri yang positif.
- 2) Kelompok atau kategori sosial dan anggota dari

mereka berasosiasi terhadap konotasi nilai positif atau negatif. Karenanya, identitas sosial mungkin positif atau negatif tergantung evaluasi (yang mengacu pada konsensus sosial, bahkan pada lintas kelompok) kelompok tersebut yang memberikan kontribusi pada identitas sosial individu.

- 3) Evaluasi dari salah satu kelompok adalah berusaha mendeterminasikan dan juga sebagai bahan acuan pada kelompok lain secara spesifik melalui perbandingan sosial dalam bentuk nilai atribut atau karakteristik.

Tinjauan mengenai identitas ini, digunakan untuk menganalisis bagaimana anggota JAI di Yogyakarta menanggapi identitas keagamaannya. Identitas keahmadiyahannya para anggota JAI, akan menunjukkan pula bagaimana eksistensi dari JAI. Apakah para penganut JAI akan menutupi identitasnya sebagai seorang ahmadi, atau bersikap terbuka pada masyarakat.

Kaitan antara konsep identitas dengan penelitian ini, juga untuk menganalisis bagaimana para anggota JAI mengidentifikasi diri mereka dengan identitas sosial kelompok mereka. Seperti yang

diungkapkan oleh Henry Tajfel, bahwa identitas sosial digunakan oleh seseorang untuk menentukan tindakan mereka sesuai dengan nilai yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Di sini, para anggota JAI akan memperlihatkan bagaimana mereka menjalankan semua tindakan-tindakannya sesuai dengan nilai-nilai keahmadiyah. Selain itu, melalui pengertian tentang identitas sosial yang disampaikan oleh Tajfel, kita akan melihat bagaimana emosi yang terjalin diantara sesama anggota JAI.

Asumsi umum mengenai identitas sosial yang ada dalam karya Hogg dan Abrams (2000) juga menjelaskan bagaimana anggota JAI akan berusaha merawat atau meninggikan *self esteem*-nya hingga membentuk konsep diri yang positif. Hal ini akan berhubungan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh JAI untuk meningkatkan keyakinan anggotanya. Dengan keyakinan diri itulah, anggota JAI akan menghadapi konsensus di luar kelompoknya yang cenderung menilai negatif keberadaan JAI.

4. **Teori Hegemoni (Antonio Gramsci)**

Pada penelitian ini, juga digunakan teori tentang hegemoni yang digagas oleh Antonio Gramsci. Teori ini digunakan untuk menganalisis adanya hegemoni pemerintah terhadap SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Maksud dari hegemoni ini adalah, bagaimana pemerintah

menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi rakyatnya melalui surat keputusan.

Antonio Gramsci (1891-1937) (dalam Jones, 2006) adalah seorang intelektual Partai Komunis Italia yang dipenjarakan pada masa rezim fasis Mussolini. Dia adalah tokoh penting dalam sejarah teori Marxis. Karl Marx dan Friedrich Engels memberikan analisis menyeluruh tentang kapital di tingkat sosial dan ekonomi khususnya menunjukkan bagaimana kapital mengantagoniskan kelas pekerja dan menyebabkan krisis - Gramsci melengkapi ini dengan suatu teori canggih tentang ranah politik dan bagaimana itu secara organik/dialektik berhubungan dengan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi.

Menurut Gramsci, unsur esensial filsafat paling modern tentang praksis (menggabungkan pemikiran dan tindakan) adalah konsep filsafat sejarah tentang hegemoni. Gramsci sendiri mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas penguasa. Ia membedakan hegemoni dari penggunaan paksaan melalui intervensi kebijakan. Meski ekonom Marxis cenderung menekankan aspek ekonomi dan aspek penggunaan kekuasaan dominasi negara, Gramsci menekankan pada hegemoni dan kepemimpinan kultural (Gramsci, 1932/ 1975: 235).

Tafsir atas hegemoni Gramsci juga dijelaskan oleh Bocock yang mengatakan hegemoni berarti “kepemimpinan moral dan filosofis”,

kepemimpinan yang dicapai lewat persetujuan yang aktif kelompok-kelompok utama dalam suatu masyarakat (Bocock, 2007: 1). Steve Jones memahami hegemoni Gramsci sebagai *cultural and political leadership* (Jones, 2006: 3). Ditinjau dari istilahnya, kepemimpinan meluas pada arti proses/operasi, pembentukan/pengarahan. Sementara jika ditinjau dari ruangnya, hegemoni bekerja pada wilayah yang menyeluruh: moral, filosofi, budaya, dan politik. Dari ruang tersebut bisa dipahami bahwa hegemoni bekerja melalui instrumen-instrumen yang sangat masif, yaitu negara, modal, agama, pendidikan, media massa, dan lain sebagainya.

Gramsci juga mendapat inspirasi tentang bagaimana Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) harus mengumpulkan dukungan untuk melawan Tsarisme, sehingga ia memikirkankan suatu strategi. Salah satu hal yang akhirnya ia lakukan adalah membuat kesadaran para pekerja untuk beraliansi dengan kelompok-kelompok lain, yang di dalamnya termasuk kritikus borjuis, petani, dan intelektual. Kesadaran kelompok-kelompok ini bagi Lenin merupakan modal utama untuk menggulingkan Tsarisme. Lenin menyebarkan pengetahuan politik kepada para pekerja dan membaurkan para pengikut Partai Sosial Demokrat dengan segala kelas di masyarakat untuk mencapai kesadaran yang ia inginkan (Bocock, 2007:22-23).

Apa yang dilakukan Lenin itulah yang disebut Gramsci sebagai

contoh hegemoni. Hegemoni beroperasi pada ranah suprastruktur, oleh karena itu seperti telah disampaikan di muka, hegemoni dicapai melalui persetujuan-persetujuan masyarakat, bukan dengan cara pemaksaan-pemaksaan fisik.

Pada penelitian ini, teori ini menjelaskan bagaimana SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dapat dipandang sebagai salah satu hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk hegemoni yang berupa surat keputusan tersebut, mencoba menggiring konsensus dari masyarakat untuk menekan kelompok Ahmadiyah. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Gramsci mengenai strategi Lenin dalam melawan Tsarisme, yakni membuat penyadaran dan pengumpulan masa. Kasus SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah juga akan dibahas mengenai kemungkinan adanya pernyataan/ isi yang bersifat menyadarkan masyarakat. Namun demikian, satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua bentuk penyadaran bersifat positif.

5. Teori Fungsionalisme Struktural

Penggunaan teori ini berkaitan dengan strategi mempertahankan eksistensi JAI dalam masyarakat Yogyakarta pasca SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah. JAI di sini dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya ada pola-pola yang mengatur tindakan mereka.

Teori ini dikemukakan oleh Talcott Parsons. Bahasan mengenai

fungsionalisme struktural Parsons ini dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” yang terkenal dengan skema AGIL. Menurutnya, sebuah sistem akan bertahan jika memiliki empat fungsi ini (Ritzer, 2007:121).

- a. *Adaptation* (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. *Goal attainment* (Pencapaian Tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L).
- d. *Latency* (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang

motivasi.

Secara sederhana, teori ini membicarakan tentang bagaimana sebuah sistem dapat bertahan dalam masyarakat, yang dianggap sebagai sistem adalah masyarakat yang memiliki pola struktural dalam.

Fungsionalisme menekankan fungsi yang dimainkan oleh peran-peran struktur sosial yang terpolakan. Ada kalanya ia disebut sebagai model konsensual, sebab ia menekankan suatu konsensus atau persetujuan pada bagiannya para anggota masyarakat. Masyarakat dianggap sebagai organisme yang hidup terdiri dari sistem-sistem terlembagakan dari peran-peran yang disebut struktur dan cenderung bekerjasama secara erat satu dengan yang lainnya (Farida Hanum, 2006: 8-9).

Pada penerapannya, teori ini akan mengupas bagaimana sistem yang ada dalam JAI dapat terus berfungsi. Bertahannya sistem-sistem yang ada, merupakan salah satu bukti eksistensi mereka. Untuk mempertahankan sistem yang ada, maka konsep AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parson bisa dipakai untuk menganalisisnya.

Adaptation (A) merupakan konsep yang akan memperlihatkan bagaimana sistem yang ada di JAI beradaptasi dengan lingkungan. Pada konsep inilah, sistem yang ada di JAI harus mampu menghadapi situasi gawat eksternal. *Goal (G)* adalah konsep mengenai tujuan. Setiap sistem yang ada, harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. *Integration (I)*

merupakan integrasi dari keseluruhan AGL. Konsep ini menunjukkan bagaimana pentingnya integrasi diantara komponen-komponen yang ada. Terakhir, *latency (L)* adalah keajegan atau kemapanan bagi sebuah sistem. Maka dari itu, perlu adanya pemeliharaan pola-pola kultural diantara anggotanya. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan motivasi.

6. **Konsep Solidaritas Sosial**

Konsep solidaritas sosial ini, digunakan untuk mengkaji bagaimana solidaritas yang terjalin diantara penganut JAI. Solidaritas ini, akan menunjukkan bagaimana kekompakan mereka dalam menghadapi tekanan-tekanan yang berasal dari luar.

Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim (1858-1917) dalam mengembangkan teori sosiologi. Durkheim (dalam Lawang, 1994:181) menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan/ atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Menurut Durkheim (Ritzer, 2007), solidaritas sosial masyarakat terdiri dari dua bentuk yaitu solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik.

a. Solidaritas Sosial Mekanik.

Pandangan Durkheim mengenai masyarakat adalah sesuatu yang hidup, masyarakat berpikir dan bertindak laku dihadapkan kepada gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial yang seolah-olah berada di luar individu. Fakta sosial yang berada di luar individu memiliki kekuatan untuk memaksa. Pada awalnya, fakta sosial berasal dari pikiran atau tingkah laku individu, namun terdapat pula pikiran dan tingkah laku yang sama dari individu-individu yang lain, sehingga menjadi tingkah laku dan pikiran masyarakat, yang pada akhirnya menjadi fakta sosial. Fakta sosial yang merupakan gejala umum ini sifatnya kolektif, disebabkan oleh sesuatu yang dipaksakan pada tiap-tiap individu.

Pada masyarakat, manusia hidup bersama dan berinteraksi sehingga timbul rasa kebersamaan diantar mereka. Rasa kebersamaan ini milik masyarakat yang secara sadar menimbulkan perasaan kolektif. Selanjutnya, perasaan kolektif yang merupakan akibat (resultan) dari kebersamaan, merupakan hasil aksi dan reaksi diantara kesadaran individual. Jika setiap kesadaran individual itu

menggemakan perasaan kolektif, hal itu bersumber dari dorongan khusus yang berasal dari perasaan kolektif tersebut. Pada saat solidaritas mekanik memainkan peranannya, kepribadian tiap individu boleh dikatakan lenyap, karena ia bukanlah diri individu lagi, melainkan hanya sekedar mahluk kolektif.

b. Solidaritas Sosial Organik

Solidaritas organik berasal dari semakin terdiferensiasi dan kompleksitas dalam pembagian kerja yang menyertai perkembangan sosial. Durkheim merumuskan gejala pembagian kerja sebagai manifestasi dan konsekuensi perubahan dalam nilai-nilai sosial yang bersifat umum. Titik tolak perubahan tersebut berasal dari revolusi industri yang meluas dan sangat pesat dalam masyarakat. Menurutnya, perkembangan tersebut tidak menimbulkan adanya disintegrasi dalam masyarakat, melainkan dasar integrasi sosial sedang mengalami perubahan ke satu bentuk solidaritas yang baru, yaitu solidaritas organik. Bentuk ini benar-benar didasarkan pada saling ketergantungan di antara bagian-bagian yang terspesialisasi.

Kaitan antara konsep solidaritas sosial dengan penelitian ini terletak pada kondisi solidaritas yang terjalin diantara anggotanya. Seperti yang diungkapkan oleh Durkheim, bahwa solidaritas sosial adalah hubungan antara individu dengan kelompoknya berdasarkan

pengalaman emosi. Di sini kita akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami anggota JAI seperti kekerasan, dapat membangun kekompakan.

Pada pemaparan Emile Durkheim, tentang solidaritas mekanik dan organik, akan kita telisiki bagaimana mereka tetap bisa membangun solidaritas yang kuat di tengah keadaan anggotanya yang semakin kompleks, beragam, dan mempunyai kesibukan pekerjaan.

7. Tinjauan tentang Interaksi Sosial

Interaksi sosial mengandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-stimulasi dan respon antara individu-individu dan kelompok-kelompok (Taneko, 1984: 110). Menurut H. Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan anantara dua atau lebih individu manusia ketika kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Aspek-aspek interaksi sosial adalah sebagai berikut (Santosa, 2006: 11).

- a. Adanya hubungan.
- b. Ada individu.
- c. Adanya tujuan.
- d. Adanya hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok.

Menurut Soerjono Soekanto (2007: 114), ada empat ciri-ciri interaksi sosial, antara lain.

- a. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang.
- b. Terjadinya komunikasi diantara pelaku melalui kontak sosial.
- c. Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas.
- d. Dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu.

Interaksi sosial terdiri dari kontak dan komunikasi, dan di dalam proses komunikasi, mungkin saja terjadi pelbagai penafsiran makna dan perilaku. Dengan demikian, bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu terdiri dari kerjasama, pertikaian, persaingan, dan akomodasi (Taneko, 1984: 115).

1) Kontak

Kontak sosial (Soekanto, 2007: 71) merupakan hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1999: 72) kontak sosial primer merupakan kontak sosial dalam bentuk tatap muka, bertemu, berjabat tangan, bercakap-cakap antar pihak yang melakukan kontak sosial. Sedangkan yang bersifat sekunder, yaitu kontak yang tak langsung,

mempertuhkan perantara, seperti melalui telepon, radio, surat, dan lain-lain.

2) Komunikasi

Komunikasi secara terminologis, merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.

Tinjauan tentang interaksi sosial ini, digunakan untuk mengetahui bagaimana proses interaksi antara anggota JAI dengan masyarakat sekitarnya. Seperti yang ada pada pemaparan di atas, bahwa syarat interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Melalui dua hal tersebutlah, kita juga membahas bagaimana masyarakat sekitar menghadapi anggota-anggota JAI.

B. Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini, ditemukan dua penelitian yang relevan mengenai Ahmadiyah, yakni.

1. Penelitian relevan yang dipakai dalam penelitian ini adalah skripsi yang dilakukan oleh Sofyan Pradiyatno NIM 984724041 dengan judul “Rahmat Ali dalam Penyebaran Gerakan Ahmadiyah Qadian di Indonesia (1925-1950),” Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Program Studi Pendidikan Sejarah tahun 2005.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan Rahmat Ali dalam penyebaran Ahmadiyah di Indonesia. Pada skripsi ini terdiri dari latar belakang munculnya Gerakan Ahmadiyah, latar belakang penyebarab Ahmadiyah Qadian dan muatan misi yang dibawa ke Indonesia, serta peranan Rahmat Ali mubaligh Ahmadiyah Qadian dalam penyebaran Ahmadiyah Qadian di Indonesia tahun 1925-1950. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatiff deskriptif.

Dari hasil penelitian di skripsi ini, disimpulkan bahwa gerakan Ahmadiyah muncul karena dilatarbelakangi oleh tekanan dari non Islam di kawasan Asia Selatan. Pendirinya bernama Mirza Ghulam Ahmad. Tahun 1914, organisasi Ahmadiyah terpecah menjadi dua, yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Masuknya Ahmadiyah Qadian di Indonesia dilatarbelakangi oleh berangkatnya tiga orang pelajar Indonesia dari perguruan Sumatera Thawalib menuju Asia Selatan. Pada akhirnya, pimpinan Ahmadiyah pusat menunjuk Rahmat Ali untuk menyebarkan Ahmadiyah Qadian di Indonesia (Sumatera dan Jawa) antara tahun 1925-1950. Ajarannya mendapat reaksi dari kalangan ulama dan dari kalangan non muslim. Reaksi ini dihadapi dengan dialog dan debat terbuka, tetapi tidak membuahkan hasil yang optimal, sehingga menghambat perkembangan Ahmadiyah di Indonesia.

Persamaan penelitian ini adalah bidang kajiannya yang sama-sama

melakukan penelitian kepada Ahmadiyah Qadian (JAI). Perbedaan penelitian, yang akan dilakukan peneliti terletak pada fokus pembahasan yang dikaji. Skripsi ini, memfokuskan pengkajiannya pada sejarah penyebaran Ahmadiyah Qadian di Indonesia. Peneliti memfokuskan pengkajiannya pada eksistensi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yogyakarta pasca SKB 3 Menteri 2008 tentang Ahmadiyah. JAI tersebut, adalah nama lain dari Ahmadiyah Qadian.

2. Penelitian relevan yang kedua adalah tesis yang dilakukan oleh Novie Soegiharti NPM 0706307651 dengan judul “Kajian Hegemoni Gramsci tentang Reaksi Sosial Formal terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus SKB Tiga Menteri tentang pelarangan Ahmadiyah),” Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pascasarjana tahun 2009.

Tesis ini membahas tentang SKB 3 Menteri mengenai Ahmadiyah. Pembahasan SKB 3 Menteri Ahmadiyah ini dikaji dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis dari Norman Fairclough.

SKB 3 Menteri Ahmadiyah sebagai sebuah teks, dianalisis dari aspek kebahasaan, produksi, dan konsumsi serta situasi kontekstual yang ada. Dari hasil analisis tersebut, disimpulkan bahwa ada proses hegemoni yang

terjadi dalam SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Wacana yang dihegemonikan adalah Ahmadiyah merupakan sebuah kelompok yang menyimpang dari pokok ajaran Islam sehingga harus dilarang melalui SKB 3 Menteri.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana, SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah berlaku bagi JAI. Perbedaan dengan penelitian terletak pada fokus kajiannya. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada permasalahan identitas yang melanda Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Yogyakarta pasca dikeluarkannya SKB 3 Menteri tahun 2008. Tesis ini, membahas mengenai adanya hegemoni pada isi dari SKB 3 Menteri Ahmadiyah yang dibahas melalui metode analisis wacana kritis. Pada jenis metode penelitian yang digunakan juga berbeda, karena peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *indepth interview*.

3. Penelitian relevan ketiga adalah skripsi yang dilakukan oleh Supriyanto NIM 984724047 dengan judul “Peranan Gerakan Ahmadiyah Lahore dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan di Kota Yogyakarta (1928-1979).” Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial tahun 2004. Skripsi digunakan untuk membandingkan perbedaan antara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (Qadian) dengan

Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Lahore).

Skripsi ini berisi tentang keberadaan Gerakan Ahmadiyah Lahore dan peranannya dalam bidang pendidikan di Kota Yogyakarta. Keberadaan gerakan Ahmadiyah Lahore sebagai sebuah organisasi Islam belum banyak diketahui masyarakat luas. Gerakan Ahmadiyah Lahore mempunyai latar belakang sejarah yang cukup menarik dan mempunyai peranan yang cukup penting dalam bidang dakwah dan pendidikan di kota Yogyakarta. Bertolak dari hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) gambaran umum Gerakan Ahmadiyah Lahore, (2) peranan Gerakan Ahmadiyah Lahore dalam bidang dakwah di Kota Yogyakarta, (3) peranan Gerakan Ahmadiyah Lahore dalam bidang pendidikan di kota Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ahmadiyah didirikan di Asia Selatan pada tahun 1889 oleh Mirza Ghulam Ahmad, kemudian terpecah menjadi dua kelompok pada tahun 1914, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Gerakan Ahmadiyah Lahore. Gerakan Ahmadiyah Lahore mempunyai beberapa perbedaan penafsiran mengenai ajaran Islam dengan mayoritas umat Islam di Indonesia. Gerakan Ahmadiyah Lahore masuk ke Kota Yogyakarta melalui dua orang mubaligh dari Asia Selatan pada tahun 1924 dan pada tahun 1928 terbentuk organisasi Gerakan Ahmadiyah Lahore di Kota Yogyakarta, (2) peranan Gerakan Ahmadiyah Lahore dalam bidang dakwah di kota Yogyakarta adalah menerbitkan tafsir Al-Quran, buku-

buku, majalah, dan mengadakan berbagai kegiatan pengajian. (3) peranan Gerakan Ahmadiyah Lahore dalam bidang pendidikan di Kota Yogyakarta adalah mendirikan Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) dan mengadakan pendidikan mubaligh.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kajian Ahmadiyah. Perbedaan antara skripsi dan penelitian yang akan dilakukan, terletak pada fokus pembahasannya. Pembahasan pada skripsi ini adalah Gerakan Ahmadiyah Lahore, sedangkan peneliti memfokuskan pembahasan pada Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

C. Kerangka Pikir

Kebebasan dalam berkeyakinan, beragama, dan berideologi sudah barang tentu menjadi hak semua warga negara tanpa terkecuali. Namun demikian, munculnya kekerasan yang menimpa penganut Ahmadiyah terutama JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia) di beberapa tempat di Indonesia, menjadi pertanda bahwa kebebasan atas hak yang paling hakiki tersebut masih belum terlaksana dengan baik.

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri), awalnya dikeluarkan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan pada penganut Ahmadiyah. Namun, surat keputusan yang keluar pada tahun 2008 tersebut masih belum juga menjamin keselamatan mereka. Salah satu kasus yang

cukup menyita perhatian adalah tewasnya
untuk pengikut Ahmadiyah, *pen*) JAI di

SKB 3 Menteri yang diharapkan
meredam gejolak dalam masyarakat, justru

SKB 3 Menteri tersebut, justru dipahami sebagai surat sah, untuk
memperlakukan JAI sebagai penoda agama. Ini tentu, menimbulkan sikap
pemojokkan terhadap para ahmadi. Terpojoknya para penganut ahmadiyah,
berimbas juga terhadap eksistensi atau keberadaan mereka.

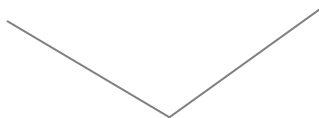
Pada penelitian ini, yang menjadi objek yang akan diteliti adalah
Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau lebih dikenal dengan singkatan JAI di
wilayah Yogyakarta. Pertimbangannya adalah, SKB 3 Menteri lebih
menyoroti JAI sebagai gerakan yang tidak sesuai dengan ajaran pokok Islam,
dari pada kelompok Ahmadiyah yang bergolongan GAI (Gerakan Ahmadiyah
Indonesia). Berikut ini merupakan bagan dari kerangka pikir yang telah
dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya.

tiga orang ahmadi (sebutan
Cikeusik.

bisa menjadi alat untuk
menimbulkan masalah baru. Isi

D.

E.



Bagan 1. Kerangka Pikir